

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : AHMAD RAIHAN, SH
NIP : 196810081992031012
PANGKAT / GOL : PENATA Tk.I (III/d)
JABATAN : KASUBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
TRIWULAN : II TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa Tugas Pokok Kasubag Kajian Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- 1 Menyusun rencana kegiatan sub bagian kajian perundang-undangan
- 2 Mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan pembentukan peraturan daerah
- 3 Membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik dan konsep bahan penyiapan draf Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
- 4 Menyusun bahan analisis produk penyusunan peraturan daerah
- 5 Merancang bahan pembahasan peraturan daerah
- 6 Memfasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah
- 7 Melaksanakan pembuatan risalah hukum perundang-undangan
- 8 Merancang dan menyusun naskah produk hukum DPRD
- 9 Menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM)
- 10 Memfasilitasi badan pembentukan peraturan daerah DPRD
- 11 Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 12 Menyimpan dan memelihara bahan dokumentasi peraturan perundang-undangan
- 13 Melaksanakan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan perpustakaan peraturan perundang-undangan

- 14 Melaksanakan proses administrasi penetapan produk hukum DPRD
- 15 Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan buku himpunan peraturan daerah
- 16 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perundang-Undangan, Persidangan dan Hubungan sesuai bidang tugas

B. Struktur Jabatan (Peta Jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS
KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

TRIWULAN II Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Perundang-Undangan dan Hubungan Masyarakat	Legislasi peraturan perundang-undangan	Persen	100 %	Program Peningkatan Pelayanan Perundang-Undangan dan Hubungan Masyarakat		Rp 148.400.000

B. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2019

TRIWULAN II Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
1	Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Perundang-Undangan dan Hubungan Masyarakat	Legislasi peraturan perundang-undangan	Persen	100 %	0 %	0 %	Program Peningkatan Pelayanan Perundang-Undangan dan Hubungan Masyarakat		Rp 148.400.000	Rp 0	0 %
<i>Rata-rata Capaian Kinerja TRIWULAN II Tahun 2019</i>						0 %					

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Capaian kinerja TRIWULAN II Tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Kasubag Kajian Perundang-Undangan dari 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran dapat mencapai 0% atau Mencapai Target dengan rincian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Perundang-Undangan dan Hubungan Masyarakat, capaian 0 %

Indikator Kinerja :

- Legislasi peraturan perundang-undangan, tercapai (0 %)

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Mengkomonikasikan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD terkait percepatan proses penyelesaian beberapa Raperda Prakarsa DPRD dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.

Untuk Triwulan III diupayakan melaksanakan penyusunan naskah akademik dan penyusunan Draf Raperda Bantuan Hukum Bagi masyarakat Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain lain (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada TRIWULAN II Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 0% (Mencapai Target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Capaian Sasaran Kinerja Subag, Kajian Perundan-Undangan adalah sangat tergantung pada kemauan politik dari Anggota DPRD untuk menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD yang ada dalam Propemperda. Tanpa ada kemauan politik dan kesungguhan dari anggota DPRD untuk melaksanakannya, maka sasaran kinerja dari sub bagian kajian perundang-undangan tidak akan tercapai, karena dalam hal ini kasubbag kajian Perundang-undangan hanya bersifat melayani.

C. Saran / masukan

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini dapat diperkecil dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun yang lalu.

Kandangan, 23 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Plt. Kabag Perundang-Undangan,
Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Kasubag Kajian Perundang-Undangan

M. SYARIFUDDIN, S.Ap
Pembina Tk.I (III/d)
NIP. 196308101987031022

AHMAD RAIHAN, SH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 196810081992031012

